



JURNAL BASICEDU

Volume 6 Nomor 4 Tahun 2022 Halaman 5839 - 5846

Research & Learning in Elementary Education

<https://jbasic.org/index.php/basicedu>



Hambatan Guru Berlatar Pendidikan Non Bimbingan Konseling Sebagai Pelaksana Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar

Aditya Dwi Nugroho^{1✉}, Achmad Fathoni²

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia^{1,2}

E-mail: a510180258@student.ums.ac.id¹, af267@ums.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah dasar; 2) Hambatan guru berlatar belakang pendidikan non bimbingan konseling sebagai pelaksana program bimbingan dan konseling di sekolah dasar; 3) Solusi guru berlatar pendidikan non bimbingan konseling dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi serta validitas data dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian ini adalah: 1) Pelaksanaan program bimbingan dan konseling dilaksanakan oleh guru kelas dalam bimbingan pribadi, karier, dan belajar; 2) Hambatan yang dialami guru kelas lulusan non bimbingan konseling adalah belum mampu menguasai kompetensi profesional, pengalaman yang masih kurang, pemberian layanan kepada peserta didik masih secara instan tidak menggunakan mekanisme yang sesuai, serta program bimbingan konseling yang belum terstruktur dan terorganisir; 3) Solusi yang didapatkan dari guru kelas lulusan non bimbingan konseling adalah harus diberikan pembelajaran kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki sebagai seorang pelaksana program bimbingan konseling dari tenaga ahli profesional, selalu berkomunikasi dengan orang tua untuk bekerja sama terkait perkembangan dan masalah anak, serta kemampuan guru kelas yang masih kurang akan bertambah dari hasil pengalaman yang dilalui.

Kata Kunci: bimbingan konseling, hambatan guru, pelaksana program

Abstract

This research aims to describe: 1) Implementation of the guidance and counseling program at elementary school; 2) Non-guidance and counseling educational teacher's barriers in implementing guidance and counseling programs at elementary school; 3) Solutions for non-guidance and counseling education teachers in implementing the guidance and counseling program at elementary school. This research types is qualitative with descriptive design. The collection techniques used are documentation, observation, interview and the data's validity is done by triangulation of sources and techniques. The results of this study are: 1) Guidance and counseling program implemetation's done by classroom teachers in personal, career, and study guidance; 2) Obstacles experienced by non-counseling graduate teachers are unable to master professional competence, lack of experience, instant service delivery to students does not using appropriate mechanisms, and counseling guidance programs are not structured and organized; 3) The solution is that they must be given defense of the competencies that must be possessed as an executor of the counseling guidance program from professional experts, always communicate with parents regarding to the development and problems of children, and the lack ability of the teachers will increase from the results of the experience they passed.

Keywords: counseling guidance, teacher barriers, program implementers.

Copyright (c) 2022 Aditya Dwi Nugroho, Achmad Fathoni

✉Corresponding author :

Email : a510180258@student.ums.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3136>

ISSN 2580-3735 (Media Cetak)

ISSN 2580-1147 (Media Online)

PENDAHULUAN

Menurut keberadaan seorang konselor di dalam tatanan sistem pendidikan sama-sama memiliki pekerjaan yang sama halnya dengan fasilitator, instruktur, tutor, widyaiswara, pamong belajar, konselor, dosen, guru, maupun istilah lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6. Pada dasarnya seorang guru pada bidang bimbingan dan konseling adalah guru yang memiliki kemahiran serta kompetensi khusus yang tidak dimiliki guru lain. Menjadi guru bimbingan dan konseling sudah pasti harus mahir dalam beberapa kemampuan dasar tahapan belajar serta pengaplikasian aktivitas pendukung, metode, serta pendekatan dalam layanan konseling (Nurrahmi, 46:2015). Keahlian profesional konselor mencakup kapabilitas tingkah laku profesi, kapabilitas keterampilan/keahlian, serta kapabilitas pengetahuan. Sesuai dengan pernyataan Permendiknas No. 27 tahun 2008 bisa ditarik kesimpulan bahwa seseorang yang berprofesi sebagai konselor wajib mempunyai 4 (empat) kemampuan yakni, kompetensi pedagogik, profesional, sosial, serta kepribadian pada saat melakukan proses bimbingan dan konseling. Pada lingkup konseling terdapat 2 individu yang terlibat yaitu konselor dan konseli.

Kesenjangan yang terjadi adalah kegiatan pelaksanaan program layanan konseling maupun bimbingan di sekolah dasar belumlah ditangani oleh tenaga profesional lulusan pendidikan bimbingan dan konseling. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia juga belum memberikan peraturan yang berisi kewajiban setiap sekolah dasar harus ditangani oleh tenaga profesional lulusan Sarjana Pendidikan (S-1) dari jurusan Bimbingan dan Konseling dalam pelayanan program terkait. Hal ini dijelaskan pada Permendiknas Nomor 111 Tahun 2014 Pasal 11 Ayat 1, dimana konselor pada peranan yang tidak mempunyai kapabilitas dari segi akademis (S1) di jurusan bimbingan serta konseling serta kemampuan konselor, dengan berkala akan dimaksimalkan kemampuannya seturut dengan kebijakan undang-undang. Maka dari itu pemberian bimbingan konseling di SD yang masih ditangani oleh guru kelas akan menjadi tidak optimal terutama dalam kompetensi profesional, apabila mengacu pada Permendiknas Nomor 111 Tahun 2014 Pasal 11 Ayat 1 dapat disimpulkan bahwa guru kelas yang memberikan pelayanan program bimbingan konseling akan mendapatkan kompetensi secara bertahap dari pengalaman selama menjadi guru kelas dan menjadi guru bimbingan dan konseling di sekolah dasar.

Permasalahan yang terjadi pada tenaga pendidik berlatar belakang lulusan non bimbingan konseling adalah rendahnya wawasan pengetahuan yang tidak dibekali sewaktu menempuh pendidikan. Sehingga ketika pendidik berlatar belakang non bimbingan konseling tersebut membantu memecahkan masalah dari konseli hasilnya tidak akan maksimal, bahkan tidak jarang ditemukan saat membantu memecahkan masalah pendidik tersebut mengalami kesulitan dan tidak menemukan karakteristik sebagai seorang konselor. Menurut (Sapriandi 2018) Perbuatan itu tidak menggambarkan individu seorang guru bimbingan konseling dimana ciri khas dirinya tidak maksimal yang bisa memunculkan masalah baru seperti kurangnya minat siswa dalam menggunakan atau memanfaatkan fasilitas layanan bimbingan konseling tersebut. Pemerintah mengeluarkan peraturan dan kebijakan dan perlu untuk menyediakan konselor untuk sekolah dasar dan membantu dengan fasilitas yang dibutuhkan dalam melangsungkan pembinaan sekolah serta layanan dari konselor (Fathoni 2021).

Kemampuan yang wajib individu konselor miliki yakni kemampuan profesional serta akademis yang menjadi sebuah kesatuan. Kemampuan akademis akan menjadi sebuah acuan ilmiah dari tujuan dilaksanakannya layanan profesional konseling serta bimbingan tersebut. Kemampuan akademis tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu: 1) Pengembangan profesionalitas serta kepribadian pembimbing dengan berkesinambungan, 2) Penyelenggaraan layanan bimbingan serta konseling yang membuat mandiri, 3) Penguasaan dasar serta rangka teoritis bimbingan serta konseling, serta 4) Pemahaman yang menyeluruh atas individu yang dibimbing.

Menurut (Zuchdi. 3: 2014) menyatakan, tingkatan pendidikan di Indonesia memiliki 3 (tiga) kategori utama yakni informal, nonformal, serta formal dan tingkatan yakni anak usia dini, dasar, menengah, serta tinggi yang meliputi yang meliputi pendidikan dasar (SD dan SMP) dan pendidikan menengah (SMA dan SMK). Namun dari 4 (empat) jenjang tersebut hal yang paling banyak menemui kendala atau masalah dalam bidang bimbingan dan konseling terdapat di tahap sekolah dasar (SD/MI). Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan bimbingan dan konseling yang dilakukan pada jenjang tersebut dilakukan oleh guru mata pelajaran atau guru pamong. Pada jenjang sekolah dasar masih banyak bidang bimbingan yang tidak diatasi atau dikelola oleh tenaga lulusan murni dari pendidikan bimbingan dan konseling.

Pada saat ini, banyak penelitian tentang “Perbandingan Kompetensi Kepribadian Guru Bk Antara Lulusan Pendidikan Bimbingan Konseling dengan Non Bimbingan Konseling”, Studi Riska Amelia dan Abu Bakar (2018) menjelaskan, dimana penanggungjawab Bimbingan dan Konseling (BK) yang mempunyai latar belakang lulusan jurusan BK memiliki keunggulan pada kemampuan sikap dan perilaku daripada pembimbing bimbingan konseling yang latar belakang Lulusan Pendidikan Non Bimbingan Konseling. Dari hasil tersebut, ada beberapa permasalahan yaitu diidentifikasi bahwsanya SDN di daerah itu tidak mempunyai pembimbing khusus dalam mendukung wali kelas untuk mengatasi persoalan murid-murid.

Pada saat ini, banyak penelitian tentang “Tata laksana pelayanan BK Oleh Guru Kelas Di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang”, Penelitian Pranoto (2015) menjelaskan, guru kelas sebaiknya senantiasa mengoptimalkan mutu tata laksana pelayanan Bimbingan dan Konselng (BK) untuk murid-murid yang dibimbingnya dengan memaksimalkan kemampuan diri melalui metode memperkaya wawasan tentang tata laksana BK di SD. Dari hasil tersebut, ada beberapa permasalahan yaitu bagaimana guru lulusan non bimbingan konseling yang tidak memiliki kompetensi khusus dalam menghadapi masalah-masalah siswa sehari-hari.

Kebaruan dari penelitian ini yaitu untuk memperluas dan mengkolaborasikan dengan studi yang sudah dilangsungkan terdahulu. Pada studi terdahulu lebih mengarah terhadap aspek pelayanan, namun penelitian ini mengarah pada aspek hambatan yang dialami oleh guru lulusan non bimbingan konseling dan penelitian yang sebelumnya mengarah pada jenjang pendidikan yang luas, namun penelitian ini hanya tertuju pada jenjang Sekolah Dasar (SD).

Dari banyaknya sekolah dasar yang tidak memiliki tenaga pendidik dari lulusan pendidikan bimbingan konseling (non Bimbingan Konseling) memberikan efek yang kurang maksimal pada saat memberikan masukan kepada konseli sebagai individu yang membutuhkan perkaitan berkaitan dengan persoala yang dialami serta memerlukan pertolongan dari konselor dalam menyelesaikannya. Maka cara alternatif yang bisa dilaksanakan yakni melalui metode meningkatkan kompetensi dari guru tersebut dan menempatkan tenaga profesional berlatar pendidikan bimbingan konseling agar dapat memberikan pelayanan bantuan dengan maksimal.

METODE PENELITIAN

Studi ini memanfaatkan metode kualitatif. Sugiyono (9:2017) menyatakan, studi kualitatif merupakan metode riset yang didasari oleh konsep postpositivisme, dimanfaatkan dalam penelitian untuk keadaan objek alami dimana penulis adalah selaku komponen utama. Metode perolehan data dilaksanakan dengan gabungan/triangulasi, sementara analisa data memiliki sifat kualitatif/induktif, dimana hasil penelitian kualitatif lebih mengutamakan arti dari pada asumsi. Desain studi yang dimanfaatkan yakni studi kasus. Pendekatan kualitatif diharapkan bisa memberikan hasil penjelasan menyeluruh mengenai tingkah laku, tulisan, maupun ucapan yang bisa ditinjau dari seseorang, komunitas, penduduk, hingga instansi tertentu. Peneliti mengedepankan pencatatan dengan penjelasan yang menyeluruh, dalam, serta lengkap untuk mengilustrasikan kondisi yang sesungguhnya demi memperkuat data yang ditampilkan (Nugrahani, 96:2014).

Lokasi riset ini di SDN 01 Dersono yang berlokasi di Dusun Dlisen, Desa Dersono, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Sasaran penelitian ini tertuju kepada kepala sekolah, guru kelas bawah dan kelas atas, serta peserta didik SDN 01 Dersono. Metode perolehan yang dimanfaatkan yakni dokumentasi, observasi, wawancara, dan analisis data yang dilaksanakan yaitu perolehan informasi, reduksi informasi, penyajian informasi serta pengambilan simpulan. Keabsahan data yang memanfaatkan triangulasi metode serta sumber. Kemudian untuk metode analisa data adalah mengumpulkan data, penyajian data, reduksi data, serta pengambilan kesimpulan (verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehadiran konselor pada tatanan edukasi nasional disebut-sebut menjadi contoh alasan yang sejalan dengan mutu pengajar, yang setara dengan persyaratan dosen, guru, instruktur, fasilitator, widyaiswara, tutor, serta pamong belajar pada Undang-Undang nomor 20 Pasal 1 Ayat 6 Tahun 2003. Tetapi terdapat berbagai tantangan yang konselor hadapi saat memberikan pelayanan BK (Nurrahmi, 2015). Pada dasarnya di sekolah dasar, guru bukan hanya sebagai pengajar tetapi juga menjadi seorang konselor. Hasil pengamatan yang diperoleh dari dokumentasi, observasi, maupun wawancara. Hasil penelitian diperoleh dari wawancara dengan kepala sekolah, satu guru kelas atas, dan satu guru kelas bawah.

Pelaksanaan program Bimbingan dan Konseling (BK) di Sekolah Dasar

1. Guru lulusan non bimbingan konseling sebagai pelaksana program BK

Pada dasarnya, semua sekolah dasar di Indonesia mayoritas yang melakukan program BK adalah wali kelas yang sudah pasti bukan tenaga ahli profesional lulusan bimbingan konseling. Berdasarkan pada hasil observasi, wawancara serta dokumentasi di SDN 01 Dersono, guru kelas selain menjadi pendidik juga turut adil sebagai pelaksana dalam pemberian pelayanan BK bagi murid-murid di sekolah terkait. Hal itu dikarenakan belum adanya guru murni lulusan bimbingan konseling. Pengajar yang juga berperan menjadi guru BK itu mengatakan belum pernah menempuh pendidikan mengenai tata laksana program bimbingan dan konseling, maka dari itu akan berdampak atas kualitas pelayanan BK (Batubara & Ariani 2018).

2. Bidang pelayanan yang diberi guru lulusan non Bimbingan Konseling (BK) untuk murid-murid

Menurut penelitian Nasution & Abdillah (65:2018) dan Handaka & Maulana (229:2017) menyatakan, bahwa bidang layanan BK mencakup 4 macam layanan, yakni: bidang bimbingan konseling pribadi, bidang bimbingan konseling sosial, bidang bimbingan konseling belajar, serta bidang bimbingan konseling karier. Dari hasil wawancara yang diperoleh dari satu pendidik kelas atas, satu pendidik kelas bawah, dan kepala sekolah, empat macam bidang layanan tersebut semuanya diberikan kepada peserta didik, yaitu: 1) Bidang layanan pribadi yang bertujuan untuk menekankan pada pendidikan karakter dan kedisiplinan masing-masing peserta didik, 2) Bidang layanan sosial yang bertujuan untuk menekankan pembekalan kehidupan bersosial yang sehat dan positif, sehingga anak memiliki bekal untuk mampu memilih kehidupan sosial yang baik, 3) Bidang layanan belajar yang bertujuan untuk mendukung murid-murid supaya meraih pertumbuhan yang pesat dalam perkembangan kognitif, agar tidak memberikan hambatan untuk tumbuh kembang siswa untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan dari materi yang diberikan, dan 4) Bidang layanan karier yang bertujuan guna mendukung pertumbuhan pengertian serta penerimaan atas individu pribadi dalam menumbuhkan kesadaran akan dampak dari perbuatan, jadi anak dibiasakan untuk memikirkan dengan baik atas keputusan yang diambil. Contohnya seperti menentukan jenjang pendidikan setelah lulus dari sekolah dasar, menentukan cita-cita, dan lain-lain.

Hambatan guru dengan latar belakang edukasi non Bimbingan Konseling (BK) sebagai pelaksana program BK di Sekolah Dasar

1. Program BK belum terstruktur serta terprogram

Dalam tahap program BK di SD Negeri 01 Dersono yang dilakukan oleh wali kelas (lulusan non bimbingan konseling), diperoleh hasil bahwa pelaksanaan program tersebut kurang terprogram, terstruktur, dan belum optimal. Sejalan dengan penelitian dari Amala & Kaltsum (2021) menyatakan bahwa, guru kelas tidak melakukan tanggung jawabnya secara maksimal sebab banyaknya pekerjaan wali kelas serta kurangnya durasi dalam tindak lanjut atas masalah siswa. Sedangkan menurut Djehaut (88:2013) menyatakan, bahwa jenis program yang harus dibuat oleh guru bimbingan konseling yaitu ada lima macam, dari kelima program tersebut saling terkait atau terikat, yaitu: 1) Program per hari, 2) Program per minggu, 3) Program per bulan, 4) Program per semester, dan 5) Program per tahun. Sejalan dengan penelitian Penelitian Agustin, Setiyadi, dan Puspita (2020) menyatakan, sebaiknya segera ditindak lanjuti dalam merancang program program BK yang tepat untuk murid SD.

2. Mekanisme pemberian layanan BK belum mumpuni

Dalam sebuah pelaksanaan kegiatan pasti akan menggunakan mekanisme kegiatan agar tujuan yang direncanakan dan diinginkan akan dapat tercapai. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling juga ada mekanisme pelaksanaan kegiatan. Menurut Saring Marsudi (102-1172018) dan Murfiah D. Wulandari (2018) menyatakan, bahwa tata laksana dilangsungkannya program BK mencakup enam macam, yaitu: analisa keperluan, perancangan, tata laksana, penilaian, pelaporan, serta penindaklanjutan. Akan tetapi, hasil pengamatan yang diperoleh menyimpulkan bahwasanya wali kelas lulusan non bimbingan konseling tidak menggunakan mekanisme yang tepat saat memberikan pelayanan kepada peserta didik, melainkan hanya menggunakan cara instan saja. Hal tersebut dikarenakan minimnya pengalaman yang dimiliki.

3. Kompetensi yang wali kelas lulusan non bimbingan konseling miliki masih kurang

Kompetensi yang wali kelas lulusan non bimbingan konseling miliki masih kurang. Kembali lagi bahwa guru kelas bukanlah tenaga profesional atau guru yang murni lulus dari pendidikan bimbingan konseling. Berdsarkan hasil wawancara dua guru kelas atas dan bawah disekolah tersebut, kurangnya kompetensi yang dimiliki dikarenakan tidak adanya pembekalan sewaktu pendidikan dan beliau juga mengakui bahwa dulunya hanya lulusan dari Sekolah Pendidikan Guru (SPG), kecuali kepala sekolah. Sekolah Pendidikan Guru (SPG) adalah sekolah menengah kejuruan yang melatih calon guru untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah yang didirikan baik oleh pemerintah maupun yayasan. Kemudian kompetensi yang wajib dimiliki oleh tenaga ahli bimbingan konseling adalah aspek tingkah laku profesi, aspek keterampilan/kemahiran, aspek ilmu pengetahuan (Nurrahmi, 46:2015).

Solusi guru berlatar pendidikan non bimbingan konseling dalam melaksanakan program BK di Sekolah Dasar

1. Membenahi pelaksanaan program BK secara terstruktur dan terprogram

Solusi pertama yang menjadi solusi adalah dengan membenahi manajemen tata laksana layanan BK dengan terstruktur serta terprogram. Penjelasannya adalah walaupun tata laksana program BK di SDN 01 Dersono masih dilakukan oleh wali kelas lulusan non bimbingan konseling, setidaknya program ini mendapatkan perhatian khusus dengan cara membuat program-program per hari, per minggu, per bulan, per semester, hingga per tahun. Agar perencanaan pemberian layanan BK bisa terjadwal serta terstruktur dengan baik sejalan dengan hal yang diperlukan oleh murid-murid. Selain itu, walaupun telah membuat program kegiatan serta mampu manajemen dengan baik seharusnya tetap ada evaluasi kegiatan agar mengidentifikasi efektivitas pelayanan dari pelaksanaanya, mengidentifikasi efektivitas pelayanan dari hasil, dan mengetahui program tersebut memberikan hasil yang menjanjikan atau tidak ada perbedaan. Hal tersebut sejalan dengan opini (Wihyanti, Subiyantoro, dan Fadhillah et al (2019) yang menjelaskan

bahwasanya program pelayanan BK haruslah terstruktur dan berurutan agar tata laksananya berlangsung dengan sesuai dan teratur.

2. Menggunakan mekanisme yang benar pada pengadaan program BK

Berikutnya yakni dengan menggunakan mekanisme yang benar dalam memberikan bimbingan kepada peserta didik. Mekanisme yang semestinya yaitu menganalisis keperluan, perancangan, tata laksana, penilaian, pelaporan, serta penindaklanjutan. Dengan kekurangan yang ada, setidaknya jika melakukan program sesuai dengan teori yang ada maka bisa mempermudah menemukan jalan keluar dari persoalan yang dialami oleh murid. Agar pemberian program BK kepada murid-murid bisa mewujudkan target serta fungsi bimbingan konseling yang semestinya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Ngilimun (140:2014) menyatakan, bahwa layanan BK mengharapkan agar instansi pengelola dapat mengusahakan pencapaian keefektifan serta keefisienan target yang sudah ditentukan.

3. Meningkatkan kompetensi guru lulusan non bimbingan konseling

Sebagai salah satu cara peningkatan kompetensi guru kelas (lulusan non bimbingan konseling) yaitu, dengan mengikuti pelatihan, workshop, penelitian, dan lain-lain. Menurut penelitian Finishia (2020) menyatakan, diadakan pelatihan bagi guru kelas yang mengikuti pelatihan untuk melaksanakan program BK di SD dan memiliki sertifikat guna memaksimalkan keterampilan menghadapi permasalahan siswa. Dengan tujuan, guru mampu memiliki pengalaman dan kompetensi dari hasil ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sesuai dengan pendapat Widodo (2019) menjelaskan bahwasanya layanan BK adalah aspek kesatuan dengan edukasi, selaku sistem pendukung dalam membantu siswa mencapai keberhasilan belajarnya di sekolah, menyelesaikan perkembangan, serta mempersiapkan masa depan dan kariernya sehingga para peserta didik bisa mencapai keberhasilan hidup yang bermakna.

4. Bekerjasama serta melakukan komunikasi dengan orang tua murid

Menurut Djehaut (2013) menyatakan, bahwa program BK merupakan subsistem edukasi (*Guidance as a sub system of education*) yang memiliki kaitan satu sama lain serta berlangsung simultan dalam mewujudkan target edukasi yang lebih menyeluruh. Dalam pelaksanaannya guru tidak hanya melaksanakan tugas sendiri, melainkan melibatkan pihak lain. Contohnya di sekolah, kepala sekolah juga menyatakan bahwa beliau juga turut serta membantu guru kelas memberikan pelayanan bimbingan konseling kepada peserta didik. Kemudian agar bimbingan lebih efektif, maka bimbingan tidak hanya dilakukan di lingkup sekolah saja, saat di rumah mereka juga harus mendapat bimbingan dari masalah yang sedang dialami melalui bantuan dan peranan aktif dari orangtua atau perwakilan murid. Pada hal ini guru kelas wajib senantiasa melakukan komunikasi serta koordinasi dengan wali dari peserta didik, berkonsultasi atas masalah yang dialami, dan saling bertukar pendapat agar masalah terselesaikan.

KESIMPULAN

Menurut hasil penjabaran mengenai hambatan guru berlatar pendidikan non bimbingan konseling sebagai pelaksana program BK di Sekolah Dasar Negeri 01 Dersono, dapat ditarik kesimpulan bahwa masih perlu diperhatikan dan direncanakan dengan dengan baik agar program BK mampu memberikan hasil yang optimal untuk pelaksanaan program tersebut dan juga untuk peserta didik. Dari bermacam rintangan serta permasalahan yang dialami guru kelas lulusan non bimbingan konseling saat memberikan layanan BK, seperti bimbingan konseling yang belum terstruktur serta terprogram, mekanisme pelaksanaan program BK kepada peserta didik yang belum mumpuni, dan kompetensi yang dimiliki guru belum mumpuni dapat diselesaikan dengan meningkatkan kompetensi guru, merencanakan program dengan matang, serta selalu berkoordinasi melalui bantuan orang tua. Selain itu guru yang berlatar belakang lulusan non bimbingan konseling melakukan kerja sama untuk menyukseskan program bimbingan konseling di Sekolah Dasar Negeri 01 Dersono. Solusi lainnya adalah dengan mengadakan sosialisasi dengan tenaga ahli untuk menambahkan

pengalaman, pembekalan, dan kemampuan kepada guru kelas lulusan non bimbingan konseling. Dengan tujuan akhir guna mewujudkan target pendidikan serta target program BK yang telah direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, M., Setiyadi, R., & Puspita, R. D. (2020). Burnout Profile of Elementary School Teacher Education Students (Estes): Factors and Implication of Guidance and Counseling Services. *PrimaryEdu - Journal of Primary Education*, 4(1), 38. <https://doi.org/10.22460/pej.v4i1.1640>
- Amala, A. K., & Kaltsum, H. U. (2021). Peran Guru sebagai Pelaksana Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Menanamkan Kedisiplinan Bagi Peserta Didik di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5213–5220. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1579>
- Djehaut, S. H. (2013). *Pengantar Bimbingan Konseling di Sekolah Dasar* (Asnawan (ed.); Cetakan II). Absolute Media.
- Fathoni, A., Muhibbin, A., Arifin, Z., Habiby, W. N., & Ismail, M. E. (2021). Implementation of guidance and counselling services to Muhammadiyah elementary schools, Surakarta, provincial central Java, Indonesia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 42(1), 177–184. <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2021.42.1.28>
- Finishia, F. T., Hidayah, N., & Rahman, D. H. (2020). The Urgency of Guidance and Counseling at the Elementary School. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 501(Icet), 162–166. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201204.028>
- Hamdan Husein Batubara, D. N. A. (2018). Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Sekolah Dasar*, 3(April 2018), 447–452. <https://doi.org/10.17977/jptpp.v3i4.10744>
- Henni Syafriana Nasution, A. (2018). *Bimbingan Dan Konseling. Konsep, Teori, dan Aplikasinya* (M. Dr. Rahmat Hidayat (ed.)). Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
- Irvan Budhi Handaka, C. M. (2017). Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Implementasi Gerakan Literasi Nasional. *Prosiding Seminar Bimbingan Dan Konseling*, 1, 227–237. <https://doi.org/TersediaOnline> di <http://pasca.um.ac.id/conferences/index.php/snbk> ISSN 2579-9908
- Murfiah D. Wulandari, S. M. (2018). *Layanan Konseling SD* (Cetakan I). Surakarta Muhammadiyah University Press.
- Ngalimun. (2014). *Bimbingan Konseling di SD/MI Suatu Pendekatan Proses* (Juairiah (ed.)). CV. Aswaja Pressindo.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Vol. 1, Issue 1).
- Nurrahmi, H. (2015). Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Dakwah Alhikmah*, 45–55.
- Pranoto, W. H. (2015). *Pelaksanaan Layanan Bimbingan Dan Konseling Oleh Guru Kelas Di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang*. Universitas Negeri Semarang. <http://lib.unnes.ac.id/21724/1/1401411583-s.pdf>
- Riska Amelia, Abu Bakar, F. (2018). Perbandingan Kompetensi Kepribadian Guru Bk Antara Lulusan Pendidikan Bimbingan Konseling dengan Non Bimbingan Konseling (Suatu Penelitian di SMA Negeri Kota Banda Aceh). (*JIMBK Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*), 3(April), 105–112. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pbk/article/view/3594>
- Sapriandi, Amri, A., & Nurdin, S. (2018). Kesulitan yang Dihadapi Guru BK Berlatar Pendidikan Non BK dalam Menangani Masalah Siswa. (*JIMBK Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*), 3, 8–15. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pbk/article/view/3616>

5846 *Hambatan Guru Berlatar Pendidikan Non Bimbingan Konseling Sebagai Pelaksana Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar – Aditya Dwi Nugroho, Achmad Fathoni*
DOI: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3136>

Saring Marsudi. (2018). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Cetakan Ke). Alfabeta.

Widodo, B. (2019). Manajemen konseling individual (studi kasus: pelaksanaan konseling individual di SMP N 7 Madiun). *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling*, 3(1), 24–30.

Wihyanti, R., Subiyantoro, S., & Fadhillah, S. S. (2019). Exploring collaboration pattern of guidance and counseling' implementers in the primary school. *Elementary Education Online*, 18(2), 482–495.
<https://doi.org/10.17051/ilkonline.2019.561891>

Zuchdi, D., Ghufro, A., Syamsi, K., Masruri, & Siasah, M. (2014). Pemetaan Implementasi Pendidikan Karakter Di SD, SMP, SMA di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1, 1–10.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jpk.v0i2.2172>